

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Transisi Energi merupakan aktivitas pergeseran penggunaan dari energi konvensional yang berbasis energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan (Jatmiko, 2024). Transisi energi ini bertujuan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, ancaman ini menjadi perhatian utama bagi setiap negara pada abad ke dua puluh satu, karena semakin tingginya emisi dari Gas Rumah Kaca yang dilakukan oleh aktivitas manusia setiap harinya. Menurut IPCC atau *Intergovernmental Panel on Climate Change* Perubahan iklim adalah jenis perubahan kondisi iklim yang dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistik dengan mengamati perubahan rata-rata dan variabilitas komponen dari waktu ke waktu, biasanya satu dekade atau lebih. (IPCC, 2012). Perubahan ini disebabkan oleh interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal, seperti penggunaan bahan bakar fosil dari batu bara, gas minyak bumi, variasi sinar matahari, dan pergeseran benua, letusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari dan elnino, serta faktor faktor yang disebabkan adanya kegiatan manusia, seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil urbanisasi, deforestasi, sehingga menghasilkan sisa pembakaran yang menghasilkan CO₂, dan N₂O, keduanya disebut gas rumah kaca yang menyelimuti bumi dan yang menangkap panas matahari.

Stockholm Conference on Human Environment menjelaskan bahwa secara global isu tentang lingkungan sudah dibicarakan sejak 1970, sehingga harus ada kesadaran masyarakat internasional terkait buruknya dampak dari global warming bagi keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan sehingga mengancam *human security*. Menggabungkan karbon dioksida dari satu atom karbon dengan satu atom oksigen di kedua sisinya menghasilkan gas rumah kaca, yang merupakan penyebab perubahan iklim. Ketika atom-atom tersebut tidak terhubung dengan erat, ikatan di antara molekul CO₂ dapat menyerap radiasi inframerah, yang menyebabkan molekul bergetar. Molekul yang bergetar kemudian

memancarkan radiasi, yang kemungkinan besar diserap oleh molekul gas rumah kaca lainnya. Siklus penyerapan, pelepasan, dan penyerapan ini melindungi permukaan bumi dari panas angkasa. (Aldrian, 2011).

Sejak revolusi industri, manusia mengandalkan batu bara, minyak, dan gas untuk menggerakkan aktivitas mereka, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun. Karbon dioksida (CO₂) adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. CO₂ adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti transportasi bahan bakar fosil (darat, udara, dan laut), penebangan liar, limbah industri, pemanasan dan pendinginan perumahan dan komersial, dan kebakaran hutan. Krisis perubahan iklim ini tidak dapat diperbaiki dengan teknologi atau sumber daya manusia dan modal yang terbatas saja. Hal ini paling mendesak, jika tindakan perbaikan tidak di ambil secepat mungkin. Krisis perubahan iklim merupakan perwujudan dari apa salah dengan bumi kita dan tentu tindakan kita sebagai manusia yang seharusnya menjaga bumi kita. Jika tindakan tidak diambil secara global berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama, maka perubahan iklim ini akan menjadi masalah global yang sangat urgent (Lahope G, 2024). Ketika dampak dari bencana lingkungan terhadap kehidupan manusia menjadi nyata, hal ini dibahas dan dikaji sebagai isu lingkungan dalam mata kuliah hubungan internasional, dan juga dalam forum-forum internasional

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan permintaan energi yang terus meningkat, transisi energi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk menggantikan sumber energi berbasis karbon dengan sumber energi bersih dan terbarukan. Wujud nyata dari transisi energi ini memerlukan keterlibatan kuat dari semua sektor, antara lain pemerintah, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah memiliki peran vital dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sumber energi bersih dan terbarukan. Tindakan konkret seperti pemberian insentif pada investasi di sektor energi terbarukan, peningkatan infrastruktur pendukung energi bersih, serta pengurangan subsidi bagi energi berbasis karbon dapat menjadi tindakan awal yang efektif dalam mendorong transisi energi. Pada tahun 2022, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia meningkat sekitar 10% per tahun, mencapai titik tertinggi baru yaitu 1,24 gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gt CO₂e) dari total emisi gas rumah kaca dunia (Ahdiat, 2023).

Menurut data Komisi Eropa, eksploitasi bahan bakar fosil (produksi, penambangan, dan pengolahan) merupakan penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Indonesia telah menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia telah menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Pada tahun 2030, Indonesia berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,89% dengan bantuan internasional. Indonesia juga telah berjanji untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2060. Sektor energi telah menghasilkan 91,5 juta ton CO₂ melalui langkah-langkah efisiensi energi, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi energi yang lebih bersih.

Selain itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) didirikan di Indonesia untuk mengelola dana untuk manajemen lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dari sumber swasta dan publik di dalam dan luar negeri (Pemerintah Kab. Sarolangun, 2023). Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah menandatangani Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang mencakup target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam rencana kerja nasional Indonesia dan dalam kesepakatan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC). Emisi akan dikurangi 31% secara mandiri dan 43% dengan kerjasama internasional pada tahun 2030. Tujuan lain dari inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Properti Makanan adalah untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap pandemi dan mengurangi dampak perubahan iklim. (Annisa, 2021). Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi perubahan iklim. Ini telah terlibat dalam diplomasi dan pembicaraan untuk mengatasi perubahan iklim Pada Konferensi Perubahan Iklim COP26, negara tersebut telah mengusulkan strategi jangka panjang untuk pembangunan yang lebih rendah karbon dan ketahanan iklim, dan telah mempersiapkan untuk beralih dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan.

Selain itu, Indonesia telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong individu untuk berkontribusi pada kegiatan mitigasi dan pemulihan

(Kementrian Lingkungan Hidup dan Keuhutan, 2024). Indonesia juga menghadiri Konferensi Para Pihak atau *Conference of the Parties* (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-28 pada tanggal 30 November - 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), sebagai bagian dari strategi transisi energi Indonesia. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) memimpin percepatan transisi energi Indonesia dengan menandatangani perjanjian kerja sama bilateral pada acara COP 28 tersebut. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, transisi energi menuju sumber energi bersih dan terbarukan merupakan hal yang tidak tidak mungkin. Melalui tindakan nyata dan kesadaran akan pentingnya transisi ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

Dalam pandangan global, kerjasama antarnegara juga sangat penting dalam mempromosikan transisi energi. Ketergantungan pada sumber energi berbasis karbon telah menjadi masalah global yang memerlukan solusi bersama. *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi kerangka kerja global yang penting dalam mencapai kehidupan berkelanjutan, terutama dalam konteks transisi energi dan mitigasi perubahan iklim. SDGs, yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB, mencakup 17 tujuan yang saling terkait, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim (Pradhan et al., 2017). Dalam konteks ini, transisi energi yang berkelanjutan menjadi sangat penting, karena sektor energi merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GRK) (Benveniste et al., 2018). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan sangat diperlukan untuk mencapai SDG 7 yang berisi Energi Bersih dan Terjangkau dan SDG 13 yaitu Tindakan terhadap Perubahan Iklim (Puma, 2024).

Transisi energi dapat dipercepat melalui kerjasama internasional dalam penelitian, pengembangan teknologi, dan pertukaran pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Tiongkok adalah negara yang dekat dengan Indonesia secara Kerjasama juga

memperhatikan ancaman Perubahan Iklim ini. Keseriusan Tiongkok dalam transisi energi ini terlihat dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok seperti kebijakan 13th *Five-Year Pland* dan 14th *Five-Year Plan*. Rencana Lima Tahun ke-13 Tiongkok, atau 13th *Five-Year Plan* (2016–2020), untuk pengembangan energi terbarukan berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (SDG7), yang menekankan betapa pentingnya mendapatkan akses ke energi yang murah, aman, berkelanjutan, dan kontemporer. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, Tiongkok menetapkan agenda khusus untuk pengembangan energi terbarukan. Ini termasuk meningkatkan kemampuan untuk menggunakan energi terbarukan serta mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil.

Tiongkok memiliki peran penting dalam transisi energi global, dan rencana ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa negara tersebut dapat memenuhi target keberlanjutannya (Rama Capriano Arnesto Putra & Iwan Ridwan Zaelani, 2021). Selain itu Pemerintah Tiongkok juga memiliki kebijakan lanjutan Rencana Lima Tahun ke-14 atau 14th *Five-Year Plan* yang mana kebijakan ini adalah Langkah melanjutkan komitmen Tiongkok dalam kebijakan sebelumnya. Rencana lima tahun ke-14 ini bertujuan untuk memandu pengembangan sektor industri hijau selama periode tahun 2021–2025, dengan komitmennya adalah mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 18% dan intensitas energi sebesar 13,5%. Untuk mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi listrik, dan memanfaatkan lebih banyak sumber daya daur ulang, rencana tersebut menetapkan pedoman untuk industri utama seperti baja, logam non-ferrous, bahan kimia, dan bahan bangunan (Reuters & David Stanway, 2021). Untuk membatasi emisi metana dari batu bara, pertanian, dan limbah, Tiongkok juga telah meluncurkan rencana aksi nasional terpisah selama lima tahun. Ini dilakukan karena metana menyumbang 76% dan karbon dioksida, masing-masing, dari emisi gas rumah kaca global. Tiongkok telah menerapkan *Clean Development Mechanism* (CDM) sesuai dengan Protokol Kyoto yang merupakan perjanjian Internasional dibawah naungan PBB yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim atau *Climate change*.

Selain itu, dalam penjelasan di laman resmi UNFCCC atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (unfccc.int) Protokol Kyoto bertujuan

untuk membangun strategi energi hijau, termasuk bidang energi listrik dan pengoptimalan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Tiongkok dan negara lain harus mengikuti Protokol Kyoto untuk mengatasi masalah lingkungan. Karena statusnya sebagai negara industri dengan emisi gas yang tinggi di dunia, Tiongkok bertanggung jawab moral atas masalah lingkungan dan harus berperilaku baik terhadap negara lain. Dalam hal ini, Tiongkok berkonsentrasi pada kebijakan pembuatan batu bara di ibu kota, terutama UBC (*Upgraded Brown Coal*), yang merupakan hasil dari penurunan kadar air batu bara pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Tiongkok memberlakukan *Cascading Style Sheets* (CSS), yang berarti karbondioksida yang dihasilkan dari batu bara dikumpulkan dan dibuang ke dalam tanah atau ke laut. Proses ini dilakukan menggunakan tungku cerobong asap agar asap yang dihasilkan tidak terbang ke udara (Bunga, 2014).

Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok dalam melakukan transisi energi ini sebagai bentuk komitmen menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060. Dalam mengatasi perubahan iklim khususnya untuk melakukan transisi energi dibutuhkan kerjasama antar negara, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masalah ini adalah masalah global yang menyinggung seluruh negara yang ada di dunia. Peluang investasi yang besar dengan Tiongkok menarik Indonesia untuk berkerjasama dalam sektor energi terbarukan di Indonesia hal ini didukung dengan investasi Tiongkok dalam sektor energi yang sudah dilakukan di Indonesia dalam periode 2006-2022 mencapai sekitar 8,9 Miliar USD (Yurika, 2024). Kerjasama dengan Tiongkok difokuskan dalam transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur untuk proyek energi terbarukan. Karena Indonesia memiliki potensi sumber daya yang cukup untuk menghasilkan listrik tenaga surya dengan biaya produksi yang rendah, kolaborasi dengan Tiongkok dapat membantu meningkatkan kapasitas manufaktur di sektor ini.

Peneliti mengambil judul ini dikarenakan perubahan iklim adalah ancaman global yang mendesak, dan transisi energi merupakan salah satu solusi utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini berfokus pada upaya konkret Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, yang relevan dengan agenda internasional saat ini. Dengan menyoroti pentingnya kerjasama antara

Indonesia dan Tiongkok dalam transisi energi, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan, terutama dalam konteks energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor-faktor politik dan ekonomi mempengaruhi kerjasama dan kebijakan energi dari sudut pandang ekonomi politik internasional. Hal ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan internasional dan dampak mereka terhadap kebijakan energi nasional. Selain itu, penelitian ini membahas masalah yang dihadapi Indonesia dalam transisi energi serta peluang yang dapat dicapai melalui kolaborasi dengan Tiongkok. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi saat ini dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai keberhasilan dalam transisi energi. Diharapkan hasilnya akan menambah literatur tentang transisi energi dan kolaborasi internasional, serta memberikan saran kebijakan yang dapat digunakan pemerintah Indonesia untuk mencapai target energi terbarukan..

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam konteks kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam transisi energi, ada beberapa pokok bahasan yang dapat ditemukan dan difokuskan dalam penelitian skripsi ini. Pertama, sangat penting untuk melihat bagaimana kebijakan energi kedua negara berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, terutama dalam hal komitmen mereka terhadap penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Indonesia, sebagai negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, harus memikirkan bagaimana mereka dapat bekerjasama dengan Tiongkok untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target keberlanjutan yang ditetapkan dalam agenda internal mereka (Hertadi et al., 2022; Poerwantika et al., 2022).

Selain itu, elemen ekonomi politik internasional dari kerjasama ini harus dipertimbangkan. Sebagai salah satu negara dengan investasi terbesar di bidang energi, Tiongkok memiliki kepentingan strategis untuk bekerjasama dengan Indonesia. Penelitian dapat menyelidiki bagaimana investasi Tiongkok dalam proyek energi terbarukan di Indonesia dapat mempengaruhi dinamika politik dan

ekonomi di wilayah tersebut, terutama dalam konteks Inisiatif Belt and Road (BRI) (Yolin, 2024; Riedho, 2024).

Selain itu, masalah yang dihadapi oleh kerjasama ini, seperti ketergantungan terhadap teknologi dan investasi asing, harus dianalisis untuk memahami konsekuensi jangka panjangnya (Yolin, 2024). Dampak sosial dan lingkungan dari kerjasama ini juga perlu dipertimbangkan. Dalam proses transisi energi, kerjasama harus mempertimbangkan bukan hanya aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Penelitian dapat menunjukkan bagaimana masyarakat di wilayah yang terkena dampak oleh proyek energi terbarukan yang didanai oleh Tiongkok dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menjaga kepentingan masyarakat lokal (Fitria, 2024).

Penelitian dapat menyelidiki bagaimana kerjasama ini dapat meningkatkan ketahanan energi Indonesia dan mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Ini adalah bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Poerwantika et al., 2022). Untuk mencapai SDG 7, yang menargetkan akses universal terhadap energi yang terjangkau, aman, berkelanjutan, dan kontemporer, penting untuk melihat bagaimana kerjasama ini membantu mencapainya. Sebagai salah satu negara yang paling banyak berinvestasi dalam sektor energi terbarukan, Tiongkok memiliki potensi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut melalui transfer teknologi dan investasi dalam proyek energi bersih (Wisudawati & Fijra, 2021). Selain meningkatkan kapasitas Indonesia untuk menggunakan energi terbarukan, proyek-proyek ini membantu mencapai target SDG lainnya, seperti SDG 13 yang berfokus pada tindakan terhadap perubahan iklim (Poerwantika et al., 2022).

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang ditetapkan untuk memastikan fokus yang jelas dan mendalam pada kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim. Agar diskusi tetap terarah, penelitian ini membatasi cakupan analisis pada topik-topik tertentu yang dianggap paling relevan. Dalam penelitian ini, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang energi terbarukan adalah fokus utama. Studi ini tidak mencakup kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam skema bilateral maupun

multilateral. Fokus utama penelitian adalah bagaimana kedua negara bekerjasama untuk mengembangkan energi hijau dan bagaimana hal ini berdampak pada upaya mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini berfokus pada investasi Tiongkok dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, termasuk aspek transfer teknologi, pembangunan infrastruktur energi hijau, dan proyek strategis untuk mengurangi emisi karbon. Pada periode waktu dalam penelitian ini mencakup periode 2019–2024, memungkinkan untuk menganalisis kebijakan yang sedang berlangsung serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung transisi energi. Penelitian ini juga membahas keunggulan komparatif Indonesia yang menarik investasi Tiongkok di bidang energi. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek politik domestik kedua negara yang tidak terkait langsung dengan kerjasama energi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional. Ini mengacu pada teori Liberalism dalam kerjasama internasional, *Green Theory* dalam studi lingkungan, dan *Comparative Advantage* dalam analisis ekonomi politik. Metode ini menawarkan kerangka analitis yang membantu memahami kerjasama energi antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan batasan ini, penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada kerjasama energi antara Indonesia dan Tiongkok selama periode 2019–2024.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam melakukan transisi energi di Indonesia?
2. Apa yang mendasari Tiongkok untuk bekerjasama dengan Indonesia?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Upaya Transisi Energi yang dilakukan Indonesia dengan bekerjasama oleh Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim global.
2. Menguraikan keunggulan yang di miliki Indonesia sehingga menarik investasi dari Tiongkok.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam bidang hubungan internasional dan ekonomi politik, khususnya terkait kerjasama energi.

Dengan pendekatan yang lebih spesifik, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya transisi energi dan kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim.
3. Menunjukkan bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dapat memberikan manfaat konkret dalam sektor energi terbarukan.
4. Menjadi landasan bagi studi lebih lanjut tentang kerjasama energi antara negara-negara lain.
5. Memberikan perspektif baru mengenai pengaruh kebijakan energi terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan diuraikan dalam 5 bab yang meliputi:

BAB I

Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, pokok masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu tentang Upaya Indonesia dan Tiongkok dalam transisi energi, kerangka teoritis terkait penggunaan Teori *Liberalisme*, *Green Theory*, dan Pendekatan Ekonomi Politik Internasional melalui teori *Comparative Advantage* pada penelitian serta kerangka penelitian.

BAB III

Berisi Pendekatan Penelitian dan Metode yang menjelaskan bagaimana penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB IV

Berisi Hasil dan Pembahasan, Membahas tentang hasil penelitian, termasuk analisis terhadap perubahan iklim global, penggunaan energi terbarukan, serta peran Kerjasama Tiongkok dan Indonesia melalui investasi dan transfer teknologi dari Tiongkok dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, dan Keunggulan Komparatif yang dimiliki Indonesia meliputi Ketersediaan Sumber Daya Alam, dan Pasar Domestik Indonesia terhadap produk Tiongkok.

BAB V

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diambil dari temuan penelitian.

